Volume 2 No. 2 2025, 622 - 633
DOI : https://doi.org/10.62335

SINERGI

Jurnal Riset Ilmiah
https://manggalajournal.org/index.php/SINERGI
E-ISSN 3031-3947

PENGHAMBAT PENERAPAN PERATURAN DAERAH PENERTIBAN MARKA JALAN

Noval Alfaridzi Hulinggi[1] , Erman I. Rahim[2] , Moh. Rivaldi Moha[3]

[1,2,3]Universitas Negeri Gorontalo

E-mail: alfaridzihulinggi01@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received :28-12-2024
Revised :18-01-2025
Accepted :23-01-2025

Keywords:*Implementation; Local regulation; Road Markings*

DOI: *https://doi.org/10.62335*

ABSTRACT

This research aims to find out what factors influence the implementation of regional regulations regarding controlling road markings. This research is empirical research that presents data based on field facts, then analyzed qualitatively descriptively. The results of the research show that the factors influencing the implementation of regional regulations regarding the control of road markings in Gorontalo City are the lack of facilities and infrastructure that support law enforcement, especially regarding violations by drivers, and providing education to road users who cannot distinguish signs and traffic signs. , including those who deliberately go against the direction and ignore the stopping place. Limited funds are also an obstacle for the Satpol PP to invite cooperation from other parties in carrying out law enforcement, for example the transportation service in overcoming the problem of providing signs or road markings in Gorontalo City. Apart from that, the lack of public awareness is also related to the legal culture and habits of the community itself. Where the public is not yet aware of the existence of a regulation. This means that the community lacks cooperation in maximizing regional regulations so that it becomes an inhibiting factor in enforcing the regional regulations themselves.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa yang mempengaruhi penerapan peraturan daerah mengenai penertiban marka jalan. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang menyajikan data berdasarkan fakta lapangan, kemudian dianalis secara dekriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor yang mempengaruhi penerapan peraturan daerah mengenai penertiban marka jalan di Kota Gorontalo ialah

kurangnya sarana dan rasarana yang mendukung penegakkan hokum terutama berkaitan dengan pelanggaran oleh pengemudi, dan pemberian edukasi kepada pengguna jalan yang tidak bisa membedakan tanda-tanda maupun rambu lalu lintas, termasuk yang sengaja melawan arah dan mengindahkan tempat pemberhentian. Keterbatasan dana pula menjadi kendala pihak satpol PP untuk mengajak kerjasama pihak lainnya dalam melakukan penegakan hukum misalnya dinas perhubungan dalam mengatasi masalah pengadaan tanda atau marka jalan yang ada di Kota Gorontalo. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat yang berkaitan pula dengan budaya hukum maupun kebiasaan masyarakat itu sendiri. Dimana masyarakat belum menyadari adanya sebuah regulasi. Artinya, masyarakat kurang bekerjasama dalam memaksimalkan peraturan daerah sehingga menjadi faktor penghambat penegakan perda itu sendiri.

PENDAHULUAN

Melalui prinsip otonomi daerah, didalam pembentukan suatu PERDA idealnya melibatkan partisipasi masyarakat daerah dengan prinsip keterbukaan serta materi muatan PERDA yang sinkron dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi agar tidak saling tumpang tindih.[1] Menurut Achmad Ali bahwasa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal Pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam penjelasan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakan perundang-undangan tersebut.[2]

Sementara itu, pelanggaran lalu lintas yang ada di Indonesia sangat memprihatinkan, karena sudah banyak permasalahan yang ditimbulkan oleh para pengemudi yang sering melanggar lalu lintas, dimulai dari rusaknya suatu kendaraan milik pengendara lain, korban luka ringan sampai dengan korban yang meninggal dunia akibat dari para pelanggar lalu lintas tersebut.[3] Hal ini tak terlepas dari adanya fasilitas jalan sebagai prasarana infrastruktur dasar yang dibutuhkan manusia untuk dapat melakukan pergerakan dari suatu lokasi ke lokasi lainnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Ketersediaan jalan menjadi hal yang dianggap mendesak manakala kegiatan ekonomi masyarakat mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Ditinjau dari sudat pandang ekonomi jalan merupakan barang public.

Seiring dengan pertumbuhan penduduk yang saat ini terjadi di Indoneisa, maka semakin meningkat pula penggunan jalan yang menggunakan transportasi maupun pejalan kaki. Transportasi adalah hal yang penting didalam suatu kota, terutama di kota

[1] Marten Bunga, *"Model Pembentukan Daerah Yang Ideal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah"*. Jurnal Hukum & Pembangunan (2020); 818-833. Doi:http//dx.doi.org/10.21143/jhp.vol49.no4.2342.

[2] *Ibid*. Hlm. 379.

[3] Denico Doly, *Penegakan Hukum Terhadap Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: Tantangan dan Prospek,* Jakarta, Jurnal Hukum, Vol. 20, Tahun 2015.

besar yang banyak penduduk juga banyak aktivitas. Transportasi juga membantu dalam menentukan keefektifan aktivitas manusia agar dapat mempersingkat waktu. Akan tetapi tidak hanya memiliki beberapa keuntungan, ada pula masalah yang berasal dari transportasi ini.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 Pasal 1 tentang jalan, Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Pada dasarnya Penyelenggara jalan umum wajib mengusahakan agar jalan dapat digunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat, terutama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, dengan mengusahakan agar biaya umum perjalanan menjadi serendah-rendahnya.[4] Sesuai dengan Pasal 4 tersebut terlihat bahwa penyelenggara jalan ini bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, tapi saat ini peningkatan kemakmuran rakyat dan pertumbuhan ekonomi nasional dirasa akan terhambat karena saat ini banyak terjadi kerusakan di jalan raya dan jika ini dibiarkan berlarut-larut tidak dapat dipungkiri lagi bahwa kerusakan ini akan menghambat peningkatan-penigkatan tersebut.[5]

Pada dasarnya pemerintah yang membidangi penyelenggara jalan ialah Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi untuk wilayah Provinsi dan Dinas Pekerjaan Umum untuk wilayah kabupaten/Kota. Maka dari itu melalui Dinas Pekerjaan Umum Kota Gorontalo semua permasalahan jalan yang ada di Kota Gorontalo harus sesuai dengan amanah Undang-Undang No 38 tahun 2008 tentang jalan. Melalui pemerintah Kota Gorontalo dalam hal ini dinas PU ialah sebuah struktural organisasi kedaerahan yang bertanggung jawab secara penuh tentang perkembangan dan keberadaan baik dan buruknya jalan maupun infrastruktur lainnya yang berada diwilayah Kota Gorontalo.

Terlepas dari pada peran dinas PU Kota Gorontalo tidak menyampingakan keberadaan lalu lintas yang ada di Kota Gorontalo. Lalu lintas merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, hampir seluruh aktivitas kehidupan masyarakat berhubungan dengan lalu lintas. Permasalahan-permasalahan lalu lintas tidak sebatas menghambat tata kehidupan masyarakat tetapi bisa menghancurkan bahkan mematikan perekonomian. Untuk itu, dibutuhkan peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan raya, sehingga masyarakat dapat melaksanakan segala aktivitasnya dengan baik, lancer, aman, dan nyaman, sehingga produk-produk yang dihasilkan dapat terus tumbuh berkembang.

Masalah sikap berlalu lintas merupakan suatu fenomena yang umum terjadi di Kota-kota besar di Indonesia terutama di Kota Gorontalo. Persoalan ini sering dikaitkan dengan bertambahnya jumlah penduduk kota yang mengakibatkan semakin meningkat aktivitas dan kepadatan di Jalan Raya.[6]

[4] PP RI Pasal 4 No. 34 Tahun 2006.
[5] Http://barbiechincta.blongspot.com/2011/04/makalah-tentang-kerusakan-jalan-raya.Html.
[6] Danu Anindhito, Ira Alia Maerani, *Ibid.*

Tata cara berlalu lintas di jalan diatur dengan peraturan perUndang-Undangan menyangkut arah lalu lintas, prioritas menggunakan jalan, lajur lalu lintas, pengendalian arus di persimpangan, tata cara melewati suatu perlintasan serta lainnya yang berkaitan dengan operasi di jalan.[7]

Pelanggaran lalu lintas yang ada di Indonesia sangat memprihatinkan, karena sudah banyak permasalahan yang ditimbulkan oleh para pengemudi yang sering melanggar lalu lintas, dimulai dari rusaknya suatu kendaraan milik pengendara lain, korban luka ringan sampai dengan korban yang meninggal dunia akibat dari para pelanggar lalu lintas tersebut.[8] Beberapa pelanggaran seperti tidak memakai helm, berboncengan tiga di motor, tidak menyalakan lampu di siang hari, dan tidak memakai safety belt sudah menjadi sebuah kebiasaan yang membudaya dikalangan Masyarakat terutama anak-anak sekolah. Pelanggaran seperti itu dianggap sudah menjadi kebiasaan bagi pengguna jalan, sehingga setiap dilakukan operasi tertib lalu lintas dijalan raya oleh Kepolisian, maka tidak sedikit yang terkena tilang ditempat.

Kondisi lalu lintas dengan karakteristik jalan dan pengemudi maka tingkat pelayanan jalan terhadap pengemudi dapat dilhat dari arah lalu lintas, kepadatan lalu lintas dan kondisi pengemudi untuk mengendarai kendaraan di jalan semakin baik kondisinya semakin baik tingkat pelayanannya. Manajemen lalu lintas meliputi kegiatan perencanaan, pengawasan, dan pengendalian lalu lintas suatu moda transportasi. Manajemen lalu lintas bertujuan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Pengawasan di jalan merupakan suatu kegiatan untuk berlalu lintas pada jaringan atau ruas-ruas jalan tertentu, termasuk dalam hal ini penataan sirkulasi lalu lintas, penentuan kesepakatan maksimum dan atau minimum, larangan penggunaan jalan, larangaan dan atau perintah bagi pemakai jalan yang tertuang dalam bentuk rambu atau marka.[9]

Adapun satu permasalahan yang sampai sekarang masih banyak dilanggar oleh pengguna kendaraan yaitu pelanggaran marka jalan. Mematuhi marka jalan pada saat penting demi kelancaran dan keamanan saat berlalu lintas. Batasan-batasan yang diberikan merupakan tanda yang harus dipatuhi demi terlaksananya aturan dalam Undang-undang lalu lintas dan Angkatan jalan ini.[10]

Berdasarkan data yang diperoleh dari Polres Satlantas Kota Gorontalo terkait dengan pelanggaran marka jalan yang ada di Kota Gorontalo, dijelaskan tabel sebagai berikut:

[7] Zulfikar Sani, *Transportasi (Suatu Pengantar),* UI-Press, Jakarta, 2010, Hal.32.

[8] Denico Doly, *Penegakan Hukum Terhadap Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: Tantangan dan Prospek,* Jakarta, Jurnal Hukum, Vol. 20, Tahun 2015.

[9] *Ibid,* Hal 37-40.

[10] Ayu Rohana Putri, *Efektivitas Sanksi Terhadap Pelanggar Marka Jalan Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkatan Jalan Oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru,* Pekanbaru, Jurnal Hukum, Vol. II, Tahun 2015.

No	Tahun	Pelanggar Marka Jalan di Kota Gorontalo
1	2017	250 pelanggar
2	2018	287 Pelanggar
3	2019	330 pelanggar
Jumlah		867 pelanggar

Sumber Data: Satuan Lalu Lintas Resort Gorontalo Kota, 2019

Jenis-jenis Marka Jalan yang banyak dilanggar oleh pengendara di Kota Gorontalo diantaranya Marka Garis Sambung atau garis pembatas jalan lajur kiri kanan dan Garis Marka Melintang (Zebra Cross) yang biasa ditemui di lampu-lampu lalu lintas dan merupakan sebuah tanda yang digunakan sebagai pembatas jarak aman untuk berhenti. Bamin Satlantas Polres Gorontalo Kota, beliau mengatakan bahwa upaya yang telah dilakukan pihak kepolisian yaitu memberikan sosialisasi kepada para Masyarakat, kemudian setelah itu mereka akan melakukan penilangan kepada pengendara yang ditemukan melakukan pelanggaran tersebut.

Meskipun Undang-undang telah dibuat dan sosialisasi telah dilakukan, para pengemudi masih saja melanggar Marka Jalan dengan alasan mereka tak sadar akan adanya garis Marka Jalan dan ketidaktahuan Masyarakat mengenai aturan yang mengatur tentang Marka Jalan tersebut. Akibat dari pelanggaran Lalu Lintas yaitu selain terganggunya para pengendara yang lain, juga mengganggu kenyamanan pejalan kaki yang berhak menggunakan Zebra Cross. Tak jarang juga kita jumpai kecelakaan Lalu Lintas yang menimbulkan korban luka ringan, luka berat hingga meninggal dunia yang diakibatkan oleh pengendara yang melanggar garis Marka sambung. Sehingga perbuatannya sudah dikategorikan sebagai kejahatan Lalu Lintas.

Kecelakaan dapat dibedakan berdasarkan jenisnya, tingkat parah korban, faktor penyebab dan berkontribusi, keadaan lingkungan, waktu. Salah satu yang dbedakan dalan tingkat parah korban yaitu, kerusakan kendaraan akibat kecelakaan tunggal, biasanya melibatkan kerusakan jalan, kelengkapan, dan bangunan disekitarnya.[11]

Melihat keberadaan Kota Gorontalo juga masih banyak jalan yang rusak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan sehingga merugikan masyarakat. Oleh karena itu, dinas Pekerjaan Umum (PU) seharusnya lebih memperhatikan jalan rusak tersebut agar tidak terjadi lagi kecelakaan yang dapat merugikan masyarakat karena hal tersebut sudah diatur dalam Undang-undang No 38 tahun 2004 tentang jalan. Namun, pada kenyataannya peneliti melihat dalam lapangan masih banyak jalan-jalan yang rusak yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas, oleh karena itu peran pemerintah khususnya Dinas Pekerjaan Umum untuk melakukan perannya terhadap perbaikan jalan sesuai dengan amanah dari pada pasal 2 Undang-Undang No 38 tahun 2004 "Penyelenggaraan jalan berdasarkan pada asas kemanfaatan, keamanan dan keselamatan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, serta kebersamaan dan kemitraan".

[11] Leksmono S. Putranto, Ph. D, *Rekayasa Lalu Lintas,* PT. Indeks, Jakarta, 2013, Hal. 163.

Sanksi administratif dapat diterapkan baik melalui jalur pengadilan maupun jalur non pengadilan, yakni oleh pejabat administrasi. Sanksi administratif yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan kebanyakan terkait dengan masalah perizinan dan dilaksanakan oleh pejabat (Badan) administrasi yang berwenang mengeluarkan perizinan tersebut. Sanksi administratif yang dijatuhkan oleh pejabat administrasi sering dikaitkan dengan pelanggaran terhadap persyaratan perizinan.[12]

Dalam PERDA Gorontalo No. 1 Tahun 2018 terdapat pasal 7 ayat (1) yang berbunyi: "Dalam upaya penertiban jalur lalu lintas dan jalan, pemerintah daerah melakukan pengaturan rambu lalu lintas dan marka jalan" dan ayat (2) yang berbunyi: "Pejalan kaki dan pengemudi kendaraan harus mematuhi ketentuan rambu lalu lintas dan marka jalan.

Sanksi administratif berupa teguran/peringatan tertulis biasanya merupakan tahapan berikutnya apabila sudah diberikan sanksi administratif berupa teguran/peringatan lisan tetapi ternyata masih tetap diabaikan dan perbuatan yang dilanggar belum dilakukan perbaikan. Sama dengan sanksi administratif teguran/peringatan lisan, sanksi administratif teguran/peringatan tertulis juga bisa dilakukan untuk lebih dari satu kali.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini adalah empiris yang menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum empiris mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat yang timbul akibat interaksi dengan sistem norma, yang muncul sebagai reaksi masyarakat terhadap keberadaan regulasi (peraturan), termasuk didasarkan pada perilaku masyarakat yang turut memengaruhi pembentukkan produk hukum.[13] Selanjutnya, jenis data yang digunakan ialah data primer dan sekunder yang diperoleh dari lapangan dan dinalisis secara deskriptif yaitu dengan memberikan gambaran menyeluruh berkaitan dengan permasalahan kemudian dibuat simpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberhasilan dalan pelaksanaan kebijakan selalui ditentukan adanya faktor pendukung yang memadai, termasuk bagaimana mengelola kebijakan tersebut secara baik dan tersistem. Selain itu, kesuksesan ini juga tergantung dari kemampuan para pelaksana didalam mengimplementasikan kebijakan dimaksud, baik berkenaan sumber daya manusia, struktur dan birokrasi pada intansi, serta penerimaan masyarakat. Meskipun begitu, tak bisa dipungkiri bahwa didalam pelaksanaan kebijakan termasuk aturan dipengaruhi pula faktor penghambat yang menjadi kendala sehingga perlu diatasi, guna menjamin terlaksananya tujuan penyelenggaraan sebuah kebijakan.

Meskipun undang-undang sudah dibuat dan sosialisasi dilakukan, namun para pengguna jalan masih saja melanggar marka atau tanda jalan, dengan berbagai alasan,

[12] Wicipto Setiadi, *Sanksi Administratif sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum.*

[13] Mukti Fajar & Yulianto Achmad. *Dualisme penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013. Hlm: 51

seperti tidak sadar akan adanya garis marka jalan dan ketidaktahuan masyarakat mengenai aturan yang mengatur tentang hal itu. Akibat pelanggaran lalu lintas ini, selain terganggunya para pengendara yang lain, juga mengganggu kenyamanan pejalan kaki yang berhak menggunakan Zebra Cross. Bahkan tak jarang juga kita jumpai kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban luka ringan, luka berat hingga meninggal dunia dan diakibatkan oleh pengendara yang melanggar garis marka sambung, sehingga perbuatannya dikategorikan sebagai pelanggaran.

Sementara itu, kecelakaan yang terjadi ini dapat dibedakan berdasarkan jenis dan tingkat keparahan korban, dimana faktor penyebab ini karena juga keadaan lingkungan. Salah satu yang dibedakan dalan tingkat keparahan korban yaitu, kerusakan kendaraan akibat kecelakaan tunggal, biasanya melibatkan kerusakan jalan, kelengkapan dan bangunan disekelilingnya.

Hal ini pula terjadi dalam pengelolaan kebijakan berkaitan dengan penertiban jalan khususnya berkenaan dengan marka jalan di Kota Gorontalo. Menurut Bapak Moh. Mulky Datau.,S.STP.,M.Si[14] terdapat kendala maupun hambatan dalam penerapan aturan, khususnya berkenaan dengan Perda No. 1 Tahun 2018 yakni;

1. Kurangnya Sarana dan Prasarana. Didalam menegakkan aturan terutama bagi pengguna jalan atau pengemudi yang melanggar marka jalan, maupun menggunakan jalan sembarangan tentu membutuhkan sarana mobilisasi, yang dilakukan untuk mengangkut kendaraan yang melanggar aturan, atau yang tidak diizinkan dilokasi terlarang. Jika sarana dan alat ini tersedia, tentu akan mendukung penegakkan hokum berkaitan dengan pelanggaran oleh pengemudi, dan pemberian edukasi kepada pengguna jalan yang tidak bisa membedakan tanda-tanda maupun rambu lalu lintas, termasuk yang sengaja melawan arah dan mengindahkan tempat pemberhentian. Olehnya itu, menurut peneliti perlu mengambil langkah persuasif dengan melakukan koordinasi secara intensif bersama pihak-pihak terkait diantaranya adalah Dinas Perhubungan dan Satlantas, dengan tujuan utamanya untuk menekankan pada tiap pemilik kendaraan agar menataati tanda larangan. Selain itu, mengedukasi masyarakat yang menggunakan jalan agar memanfaatkan fasilitas maupun lokasi penyeberangan. Hal ini sangat mungkin bisa dilakukan pemangku kebijakan sebab bila pemilik kendaraan tersebut tidak mengindahkan aturan yang ditetapkan, maka akan dilakukan penilangan dan pemberlakuan denda. Hal tersebut membutuhkan komitmen kuat para pemegang kebijakan terutama pihak Satpol dan Satlantas saat di lapangan. Pemanfaatan jalan ini harus dilakukan guna menghindari hal yang tidak diinginkan, seperti mengurangi kecelakaan, sebab hal ini juga sering terjadi di pusat perbelanjaan, dimana pengemudi maupun pejalan kaki terkadang tidak mengindahkan tanda tanda lalu lintas jalan. Dalam mengimplementasikan kebijakan terkait hal ini pula pada dasarnya karena permasalahan tanda maupun rambu lalu lintas yang rusak atau tidak tersedia.

[14] Wawancara Kasatpol Kota Gorontalo Bapak Mulky Datau.,S.STP.,M.Si

Bahkan sebagian pengendara dan pejalan kaki adapula yang mengaku jika mereka tidak melihat adanya marka atau tanda jalan, akibat sarana serta prasarana tersebut telah rusak. Olehnya, implementasi penegakkan hokum terhadap ini belum dapat dikatakan berjalan secara maksimal sebab dilihat dari bentuk pelayanan yang diberikan, khususnya itu sarana prasarana belum memenuhi harapan atau kurang memadai, dan tidak sesuai harapan masyarakat, dan menjadi kelemahan serta kekurangan dalam penerapan aturan. Olehnya dapat peneliti simpulkan bahwa, kendala dalam hal fasilitas maupun sarana ini yaitu belum adanya kendaraan yang mencukupi untuk kegiatan operasional di lapangan, dan juga pemberian tanda atau marka jalan yang kurang maksimal dalam hal ini rusak atau tidak terdapat sama sekali. Hal ini harus bisa terselesaikan oleh pemerintah khususnya terkait pengadaan mobil, hingga tanda tanda lalu lintas, agar tidak ada alasan masyarakat untuk melanggar. Dalam penegakkan pula jangan hanya dilakukan pembinaan semata terhadap pihak yang melakukan pelanggaran, namun juga diberikan sanksi yang tegas sesuai dengan Perda. Dalam tugasnya, satuan polisi pamong praja ini belum bisa menindaklanjuti secara maksimal para pelanggar yang ditemukan, dan melakukan penyitaan barang bukti sebab dikarenakan kurangnya fasilitas pendukung untuk menyita kendaraan yang melakukan pelanggaran tadi. Minimnya fasilitas yang dimiliki maka setiap pelanggaran tidak sampai pada proses pengadilan, sehingga taka da efek jera terhadap pihak yang melanggar. Selain sarana prasarana, hal lainnya yang menjadi faktor penghambat ialah keterbatasan sumber daya manusia. SDM merupakan salah satu faktor pendukung sebagai motor penggerak dalam pelaksanaan suatu kegiatan khususnya dalam penerapan aturan Perda. Kualitas SDM dari pelaku maupun penegak aturan dikatakan memadai bila tingkat pendidikan formal yang dimiliki personil cukup baik, sehingga memiliki kecakapan serta kemampuan yang cukup tinggi dalam melaksanakan tugasnya. Hasil penelitian di lapangan oleh peneliti menunjukan bahwa tuntutan kualitas dan kuantitas penegak aturan belum memadai sehingga menghambat proses penyelenggaraan penegakkan aturan. Sebab, karena aparatur inilah yang bersentuhan langsung dengan tugas yang akan dilaksanakannya. Menurut kepala Satpol bahwa, terkait dengan permasalahan kualitas dan jumlah dari satuan ini memang masih terbatas sehingga biasanya masih meminta bantuan langsung dari dinas perhubungan dalam hal mengimplementasikan kebijakan penegakkan dan pelayanan berkenaan dengan aktivitas di jalan, yang seharusnya pihak satpol ini memiliki kemampuan tersendiri. “Tak dipungkiri pada kenyataan bahwa aparatur pelaksana kami masih memiliki sumber daya yang rendah, terlihat dari ketidak mampuan mereka mengimplementasikan kebijakan ini sampai sekarang masih banyak masyarakat yang belum begitu paham mengenai kebijakan terhadap pemanfaatan marka jalan khususnya penyeberangan, sehingga perlu adanya perhatian khusus dengan memberikan diklat dan pelatihan mengenai pengelolaannya”. Berdasarkan penjelasan

diatas dapat dipahami bahwa kendala yang dihadapi dalam pengimplementasian ini adalah kurangnnya pengetahuan aparat pelaksana mengenai perda pengelolaan pelayanan di jalan umum, sehingga mereka tidak dapat menjelaskan secara maksimal kepada masyarakat yang ada. Hal ini menandakan bahwa pentingnya sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu kebijakan daerah apalagi dalam pelaksanaan pelayanan yang membutuhkan keahlian yang baik, sehingga bisa menciptakan kepuasan di masyarakat. Tak hanya sumber daya petugas dalam hal ini pihak Satpol PP, melainkan juga petugas di pemberhentian kendaraan itu sendiri kadang tidak memahami betul bahwa pengelolaan jalan ini perlu dimaksimalkan agar tidak sampai mengganggu kepentingan dan kenyamanan masyarakat lain sebagai pengguna jalan, dan harus menguasai bagaimana tata cara mengelola kendaraan, untuk mendukung pelayanan agar tidak sampai dapat menggangu arus lalu lintas. Menurut Bapak Arfan selaku masyarakat pengguna jalan di Kota Gorontalo, bahwa pemanfaatan jalan di Kota Gorontalo belum berjalan sesuai harapan masyarakat maupun pemerintah, sebab dapat dilihat dari bentuk kepuasan masyarakat yang belum terpenuhi, yang artinya pelayanan yang diberikan selama ini masih belum memenuhi harapan pelanggan atau masyarakat, dimana masih ada kelemahan yang dampaknya sering merugikan masyarakat. Selain itu, keterbatasan kewenangan seperti dalam hal melakukan tilang, pihak Satpol PP dan Dinas Perhubungan tidak dapat melakukan itu, dan hanya bisa memperingatkan para pengendara baik roda empat maupun sepeda motor, karena kewenagan tilang itu adalah wewenang dari pihak Kepolisian Lalu Lintas. Olehnya, keberhasilan sebuah sebuah organisasi akan sangat ditentukan oleh kemampuan dan kewenangan pelaksana aparatur yang melaksanakan kegiatan tersebut, dalam hal ini implementasi kebijakan pelayanan dan pengaturan lalu lintas jalan umum di Kota Gorontalo, yaitu apakah aparatur yang ada mampu mengimplementasikan perda tersebut atau tidak. Kegagalan yang sering terjadi sebab dalam implementasi kebijakan, salah satunya disebabkan oleh keterbatasan kewenangan serta personil yang tidak mencukupi memadai, bahkan tidak kompeten dalam bidangnya. Dalam hal ini kemampuan mereka dalam mengimplementasikan perda ini dan kemampuan mereka dalam mengawasi penggunaan jalan sesuai aturan yang berlaku. Hal ini tentu sangat membutuhkan petugas yang cukup memadai serta memiliki kemampuan dan pengetahuan mendalam mengenai Perda. Harus pula diakui bahwa dalam pengimplementasian perda di Kota Gorontalo selain membutuhkan kemampuan pelaksana dalam mengawasi dengan baik, juga membutuhkan jumlah yang lebih banyak di lapangan untuk mengantisipasi jalan agar tidak sembarangan digunakan dan disalahgunakan oknum masyarakat. Menurut Kasatpol bahwa dengan adanya petugas yang memadai maka dapat menegur dan memberi sanksi yang kadangkala tidak mengikuti rambu lalu lintas. Maka olehnya itu diharapkan agar pemerintah lebih memperhatikan SDM terutama

petugas penegak Perda dalam hal ini satuan polisi pamong praja untuk lebih intens menjaga kawasan yang rentan terjadi kecelakaan dan pelanggaran. Tak hanya itu, selain kemampuan ini perlu dibarengi pula dengan sikap aparatur yang mempunyai watak serta karakteristik baik misalnya mempunyai komitmen, jujur dan tegas, sebab jika petugas memiliki sikap baik maka masyarakat tentu akan lebih patuh dan menjalankan apa yang diinginkan aparatur pelaksana. Sebaliknya, jika petugas tidak memiliki komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pelaksana kebijakan dengan baik, dalam menjalankan tugas dan menegakkan aturan tersebut akan kurang maksimal.

2. Keterbatasan dana. Penyebab sarana dan prasarana yang kurang memadai, juga dikarenakan masalah keterbatasan dana yang ada di pemerintah daerah, khususnya dalam hal penegakkan aturan dalam perda. Kurangnya anggaran pemerintah tidak hanya untuk penyediaan sarana dan fasilitas melainkan juga dalam hal pelaksanaan penegakkan aturan. Hal ini diakui pula oleh bapak Sudirman dimana terdapat keterbataan anggaran operasional oleh petugas sehingga menjadi kendala penegakkan perda. Tak bisa dipungkiri, dalam menegakan aturan membutuhkan dana operasional di lapangan untuk menunjang keberhasailan program. Keterbatasan dana tersebut juga menjadi kendala pihak satpol PP untuk mengajak kerjasama pihak lainnya dalam melakukan penegakan hukum misalnya dinas perhubungan dalam mengatasi masalah pengadaan tanda atau marka jalan yang ada di kota gorontalo. Hal ini mengakibatkan juga kurangnya anggota satuan polisis pamong praja yang melakukan pengawasan, sebab dalam melakukan operasi hanya untuk waktu beberapa saat saja dan tidaklah rutin. Terbatasnya dana untuk digunakan dalam merespon masalah, membuat masyarakat menjadi tidak taat dan patuh terhadap keberadaan Perda. Hal lain yang biasanya muncul saat ada upacara adat di daerah maupun perayaan hari besar sehingga menggunakan tempat umum, sehingga masyarakat terpaksa melanggar tanda jalan. Olehnya, peran aktif petugas dalam proses dan pelaksanaan pengawasan perlu dilakukan dengan membawa kedekatan terhadap masyarakat. Kedekatan ini yang pada akhirnya dapat menimbulkan rasa simpati yang menghasilkan kepercayaan masyarakat, sehingga kecakapan komunikasi serta berinteraksi petugas perlu digalakkan untuk menunjang pelaksanaan aturan. Kedekatan ini pun akan membuat seorang petugas menjadikan masyarakat menuruti apa yang menjadi ketetapan sehingga petugas mampu menggerakkan pengguna jalan serta masyarakat agar mau melaksanakan perubahan persepsi dan mewujudkan keberhasilan kebijakan khususnya Perda di Kota Gorontalo. Perlu pula komunikasi yang baik antara instansi pemerintah dan petugas yang ditunjuk sebagai pelaksana, dalam pengimplementasian dan pengelolaan yang baik agar lebih efektif dan dapat menghasilkan sebuah hasil implementasi yang baik pula. Selain itu, faktor yang menghambat adalah adanya keterbatasan waktu operasi, sehingga tidak memungkinkan penegak hokum dalam hal ini Satpol dan pihak Dinas

Perhubungan hingga Polisi Lalu Lintas untuk selalu memperingati pelaku agar tidak melakukan pelanggaran di jalan dan menggunakan jalan disembarangan. Masih banyaknya tugas-tugas dari instansi khususnya Satpol PP yang harus dilakukan maupun dikerjakan, sehingga tidak bisa selalu ada di lapangan dan melaksanakan penegakkan aturan berkenaan dengan penertiban marka jalan.

3. Kurangnya kesadaran masyarakat. Berkenaan dengan kesadaran masyarakat tentu berkaitan pula dengan budaya hukum maupun kebiasaan masyarakat itu sendiri. Apabila masyarakat sadar akan adanya sebuah peraturan, tentu mereka mau mematuhi dan tentunya dapat menjadi faktor pendukung terlaksananya sebuah aturan. Sebaliknya, apabila masyarakat kurang bekerjasama tentu akan menjadi faktor penghambat dalam penegakkan perda itu sendiri. Menurut bapak Sudirman bahwa salah satu hambatan yang sangat berarti dan turut menentukan berhasilnya suatu penegakkan perda ini adalah menyangkut budaya hukum itu sendiri, yang saat ini masyarakat belum sepenuhnya menyadari hal tersebut. Sebagian masyarakat mengaku belum mengetahui adanya suatu larangan di tempat-tempat tertentu. Disisi lain adapula yang sudah tahu tapi tidak mengindahkan aturan dan larangan tersebut. "*Ada masyarakat yang belum tahu dan adapula yang telah mengetahui adanya peraturan daerah,, namun tetap cuek dan tidak mau bekerjasama*". Hal ini tak hanya masyarakat sebagai pengendara, namun juga terdapat orang-orang yang memanfaatkan situasi seperti pengguna jalan. Adanya oknum masyarakat yang kemudian menggunakan jalan sembarangan, tentu menghambat implementasi kebijakan yang diterapkan pada masyarakat. Oleh karena itu, semestinya pemerintah perlu secara intens untuk mengedukasi masyarakat, karena budaya masyarakat yang tidak mau tahu menjadi sesuatu yang sangat menghamat penerapan aturan. Olehnya, diperlukan upaya pemerintah untuk mensosialiasikan lebih jelas mengenai kebijakan dalam hal ini perda, khususnya berkenaan dengan pasal pengaturan marka jalan pada seluruh masyarakat, serta membuat pelaksanaan penegakkan hokum khususnya perda menjadi maksimal.

Berdasarkan uraian di atas, dapat peneliti jabarkan bahwasanya faktor yang mempengaruhi penerapan Perda No. 1 Tahun 2018 Tentang Penertiban Marka Jalan di Kota Gorontalo yaitu dari segi substansi hukum telah terpenuhi dengan adanya peraturan daerah yang diterbitkan oleh pemerintah Kota Gorontalo. Tak hanya itu, dari sisi struktur hukum pula telah ada perangkat hokum yang bekerja di lapangan, dalam hal ini unsur Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan kepolisian yang bertugas berdasarkan tufoksi maupun standar operasional prosedur.

Akan tetapi, dari sisi budaya hukum memberi pengaruh terhadap penerapan regulasi dimaksud (Perda Nomor 1 Tahun 2018), dimana kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi rambu lalu lintas terutama marka jalan sehingga memberi pengaruh terhadap implementasi aturan secara efektif di lapangan. Selain itu, faktor keterbatasan dana maupun sarana prasarana pula menjadi penghambat dalam menjalankan aturan dimaksud sehingga dapat berjalan sesuai keinginan dan harapan seluruh pihak.

KESIMPULAN

Faktor yang menghambat penerapan peraturan daerah mengenai marka jalan di Kota Gorontalo ialah kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung penegakkan hokum terutama berkaitan dengan pelanggaran oleh pengemudi, dan pemberian edukasi kepada pengguna jalan yang tidak bisa membedakan tanda-tanda maupun rambu lalu lintas, termasuk yang sengaja melawan arah dan mengindahkan tempat pemberhentian. Keterbatasan dana pula menjadi kendala pihak satpol PP untuk mengajak kerjasama pihak lainnya dalam melakukan penegakan hukum misalnya dinas perhubungan dalam mengatasi masalah pengadaan tanda atau marka jalan yang ada di Kota Gorontalo. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat yang berkaitan pula dengan budaya hukum maupun kebiasaan masyarakat itu sendiri. Dimana masyarakat belum menyadari adanya sebuah regulasi. Artinya, masyarakat kurang bekerjasama dalam memaksimalkan peraturan daerah sehingga menjadi faktor penghambat penegakannya.

DAFTAR PUSTAKA

Book

Leksmono S. Putranto, Ph. D, *Rekayasa Lalu Lintas,* PT. Indeks, Jakarta, 2013

Mukti Fajar & Yulianto Achmad. *Dualisme penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013.

Wicipto Setiadi, *Sanksi Administratif sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum.*

Zulfikar Sani, *Transportasi (Suatu Pengantar),* UI-Press, Jakarta, 2010

Journal article

Ayu Rohana Putri, *Efektivitas Sanksi Terhadap Pelanggar Marka Jalan Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkatan Jalan Oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru,* Pekanbaru, Jurnal Hukum, Vol. II, Tahun 2015.

Denico Doly, *Penegakan Hukum Terhadap Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: Tantangan dan Prospek,* Jakarta, Jurnal Hukum, Vol. 20, Tahun 2015.

Marten Bunga, *"Model Pembentukan Daerah Yang Ideal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah".* Jurnal Hukum & Pembangunan (2020); 818-833. Doi:http//dx.doi.org/10.21143/jhp.Vol 49. No 42342.

Sumber Lain

Wawancara Kasatpol Kota Gorontalo Bapak Mulky Datau.,S.STP.,M.Si

Http://barbiechincta.blongspot.com/2011/04/makalah-tentang-kerusakan-jalan-raya.Html.